

Implementasi E-Government dalam Pengembangan Tata Kelola Smart Village di Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju

Nur Mutma Inna¹, Nuryanti Mustari², Amir Muhiddin^{3*}

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹²³ Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

email: nur@gmail.com¹, hardiinna5@gmail.com;² amir.muhiddin@unismuh.ac^{3*}

Abstract

This research aims to understand the implementation of E-Government in Smart Village Governance in Rante Mario Village, Tommo District, Mamuju Regency. The type of research used is qualitative. The data sources used are observation, interview and documentation techniques. The research results show that the implementation of e-government in smart village governance in Rante Mario village, Tommo sub-district, Mamuju district, illustrates that Rante Mario Village faces various challenges and opportunities in implementing the smart village program. The challenges faced in developing smart village governance are due to inadequate human resources, such as villages that already have smart villages, the next challenge is that the website cannot be used yet and the wifi is still in the process of being repaired. And the opportunities faced in terms of developing this smart village are being able to improve the quality of society in the local economy, being able to improve digital infrastructure, improving the quality of life of the community so that it will be better in the future, and to better understand technology so as not to miss out on new innovations and education. for the progress of the village itself and society. using theory according to David Corten, the results show that the implementation components are compatibility between the program and the users or users, compatibility between the program and the implementing organization, compatibility between the group and the users, these components are in the implementation of e-government in smart village governance in Rante Mario village, Tommo sub-district, Mamuju district is in accordance

Keywords: Development; E-Government; implementation; Smart village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Implementasi E-Government dalam Tata-tata Kelola Smart Village di desa Rante Mario, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif sumber data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dalam tata kelola smart village di desa rante mario, kecamatan tommo kabupaten mamuju, menggambarkan Desa Rante Mario menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam penerapan program smart village. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola smart village yaitu karena sumber daya manusia yang belum mempunyai seperti desa-desa yang sudah lebih dulu mempunyai smart village, tantangan berikutnya itu website-nya yang belum bisa digunakan dan wifi-nya masih dalam proses perbaikan. Dan adapun peluang yang di hadapi dalam hal pengembangan smart village ini yaitu dapat meningkatkan kualitas masyarakat pada ekonomi lokal, dapat meningkatkan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya, dan agar lebih memahami teknologi supaya tidak ketinggalan inovasi-inovasi baru dan edukasi untuk kemajuan desa itu sendiri dan masyarakat. dengan menggunakan teori menurut David Corten, hasil menunjukkan bahwa komponen implementasi yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat atau pengguna, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok dan pemanfaat, komponen tersebut dalam implementasi e-government dalam tata kelola smart village di desa rante mario, kecamatan tommo kabupaten mamuju telah sesuai

Keywords: E-Government, Implementasi; Pengembangan Desa; Smart village

*)Penulis Korespondensi

E-mail : amir.muhiddin@unismuh.ac

Pembahasan

E-government merupakan konsep yang mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan administrasi publik (Glyptis et al., 2020; Negumbo, 2018). Konsep ini bukan hanya sekedar transformasi digital administrasi, tetapi juga melibatkan transformasi dalam cara kita berinteraksi dengan pemerintahan dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan (Bwalya & Mutula, 2016; Koniyo et al., 2021; Napitupulu, 2017; Roy, 2006; Schuppan, 2009). Seiring berjalannya

waktu, banyak daerah mulai menerapkan e-government untuk pelayanan publik, yang disertai dengan sejumlah besar lembaga pemerintah yang mulai menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan mereka sebagai media untuk memfasilitasi penyebaran informasi publik dan penyelenggaraan bisnis publik (Afrizal & Wallang, 2021; Koo, 2019; Rachmawati & Fitriyanti, 2021, 2021; Sabani, 2020).

Sebagai hasil dari pertumbuhan dan kemajuan teknologi, e-government tidak diragukan lagi merupakan upaya langsung dari pemerintah untuk memberikan layanan prima terhadap masyarakat (Asmorowati et al., 2019; Dias, 2020; Yap & Ahmad, 2020). Selain itu, e-government juga dapat digunakan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam tata kelola pemerintahan (Cedric Bizimana, 2020; Gamayuni & Hendrawaty, 2022; Jauhari et al., 2015; Suhardi et al., 2015; Sukarno & Nurmandi, 2023).

Desa merupakan garda terdepan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pembangunan nasional (Irsyadillah & Ma'ruf, 2022; Nas et al., 2019; Rido, 2020), oleh karena itu, penguatan pedesaan adalah hal yang harus diprioritaskan dalam kasus (Kolopaking et al., 2022; Wang & Zhu, 2022; Wilson et al., 2018; Zhao et al., 2020). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengubah daerah sekitar pedesaan menjadi pusat pengembangan manusia, ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Maulita, 2022).

Pengembangan tata Kelola smart village merupakan tujuan penting dalam mewujudkan desa yang modern dan berkelanjutan (Adamowicz & Zwolińska-Ligaj, 2020; Adesipo et al., 2020; Park & Cha, 2019). Di desa Rante Mario, penerapan e-government memiliki potensi besar untuk membentuk desa yang lebih maju secara teknologi dan memiliki kualitas layanan yang lebih baik bagi Masyarakatnya. Melalui platform e-government, Masyarakat dapat mengakses informasi tentang program-program Pembangunan, kebijakan-kebijakan terbaru, serta memiliki mekanisme untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Cedric Bizimana, 2020; Farida & Lestari, 2021; Hartanto et al., 2021; Milakovich, 2012; Todoruț & Tselentis, 2018). Penerapan smart village di Indonesia konteks ini didukung oleh 3 (tiga) elemen utama, yakni kapasitas pemerintah, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi (Mohanty et al., 2020; Patnaik et al., 2020). Selain mengintegrasikan setiap elemen ke dalam satu sistem teknologi informasi yang mudah diakses, tujuan pengembangan desa cerdas adalah untuk menyediakan transportasi umum universal yang efisien, dapat diakses dan adil untuk seluruh populasi (Aziiza & Susanto, 2020; Gerli et al., 2022).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, konsep Smart Village telah menjadi gagasan viral yang harus dipertimbangkan (Fatimah et al., 2020; Renukappa et al., 2022). Ini adalah hasil dari beberapa perubahan yang telah terjadi, yang pertama adalah akselerasi revolusi industri 4.0, yang memberitahu masyarakat Indonesia bahwa mereka harus mampu melakukan bisnis online (Bielska et al., 2021; Kalinowski et al., 2022; Zhang & Zhang, 2020). Oleh karena itu, pemerintah desa telah ditugaskan untuk memaksimalkan kapasitas digitalisasi dan menggunakannya untuk menyediakan layanan digital kepada masyarakat umum (Anando Archie Alexander Pangemanan, 2021; Azilani et al., 2020; Kolopaking et al., 2022; Leong et al., 2016; Suyatna et al., 2019). Sebaliknya, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk informasi dan komunikasi melalui perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan perangkat lainnya seperti pendukung (Bondarchuk P, 2021; Effah & Nuhu, 2017; Low, 2021; Marinică, 2020; Mynenko & Liulov, 2022; Ponti et al., 2021). Selain itu e-government juga membuka peluang untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik (Asmorowati et al., 2019; Florano, 2014; Höchtl et al., 2016; Hujran et al., 2023; Wilke et al., 2020; Yap & Ahmad, 2020). Informasi mengenai layanan Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur dapat diakses secara lebih muda oleh Masyarakat (Epps et al., 2021; Gamayuni & Augusta, 2019; Raudah et al., 2021).

Pengembangan e-government juga dapat menjadi alternatif strategis untuk berbagi informasi di dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Rafinzar & Kismartini, 2020).

Transparansi dalam pemerintahan juga merupakan elemen penting dalam Pembangunan berkelanjutan (Ferdiansyah & Hidayat, 2014; Kusuma et al., 2022; D. A. D. Nasution & Ramadhan, 2019). Dengan adanya platform e-government, informasi tentang anggaran publik, kebijakan pemerintah, dan proyek-proyek Pembangunan dapat diakses oleh Masyarakat dengan mudah (Sari & Winarno, 2012; Wijayanto, 2015). Ini membuka peluang bagi Masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik dan memberikan masukan yang konstruktif (Chohan & Hu, 2022; W. Setyawan & Gamayuni, 2020; Sukarno & Nurmandi, 2023). Selain itu, e-government juga mendorong partisipasi aktif Masyarakat dapat memberikan pendapat mereka tentang kebijakan dan program-program yang sedang dikerjakan (Aichholzer & Strauß, 2016; Bataineh & Abu-Shanab, 2016; Dias, 2020; Halachmi & Greiling, 2013; Purón-Cid, 2014; Roy, 2006; Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012). Partisipasi ini memberikan legitimasi pada kebijakan yang diambil dan membantu memastikan bahwa kepentingan (Rafinzar & Kismartini, 2020).

Kemudian dalam perkembangannya, telah banyak daerah yang menerapkan e-government pada pelayanan publik, ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik (Asmorowati et al., 2019; Gamayuni, 2020; Gamayuni & Augusta, 2019; Harianja, 2018; Joshi & Islam, 2018; Kyakulumbye et al., 2019; S. Setyawan et al., 2018). Hal ini tentunya penerapan e-government bukan semata-mata karena perkembangan itu dari perspektif lingkungan strategik, tetapi lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat (Achmad et al., 2021; Milakovich, 2012; Oktariyanda & Rahaju, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana e-government dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks desa di Indonesia, khususnya di Desa Rante Mario, Kec. Tommo, Kabupaten Mamuju. Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu tentang implementasi e-government dalam pengembangan tata kelola smart village yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama dalam konteks meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Alcaide Muñoz & Rodríguez Bolívar, 2017; Alsaif, 2013; Asmorowati et al., 2019; Farida & Lestari, 2021; Sakti, 2021; S. Setyawan et al., 2018), transparansi (Farida & Lestari, 2021; Halachmi & Greiling, 2013; Roy, 2006; Suryana et al., 2024; Woro & Supriyanto, 2013a, 2013b), partisipasi masyarakat (Bataineh & Abu-Shanab, 2016; Chan, 2013; Lee-Geiller & Lee, 2019; Ong et al., 2022; Purón-Cid, 2014), dan pengembangan ekonomi lokal (Bwalya & Mutula, 2016; Majeed & Ayub, 2018; Manenji & Marufu, 2016; Rorissa & Demissie, 2010; Wen et al., 2021).

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang bagaimana e-government dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di perkotaan (A. P. Nasution & Atika, 2019; Puspitarini, 2023; Rachmawati & Fitriyanti, 2021, 2021; Suryana et al., 2024). Misalnya, penelitian oleh Puspitarini (2023) yang membahas implementasi e-government di kota besar seperti Surabaya menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu dan biaya pelayanan. Namun, berbeda dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana e-government dapat diimplementasikan di desa dengan infrastruktur yang mungkin belum memadai. Ini termasuk tantangan unik seperti akses internet yang terbatas, literasi digital masyarakat, dan sumber daya manusia. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi tantangan infrastruktur khusus di desa, seperti akses internet yang terbatas dan kurangnya pelatihan teknologi untuk perangkat desa. Sehingga, secara implikasi penelitian ini akan menyediakan

solusi praktis yang dapat diterapkan dengan sumber daya yang ada. Penelitian ini menambahkan kontribusi penting dengan fokus pada implementasi e-government dalam konteks desa, yang memiliki tantangan dan peluang yang berbeda dibandingkan dengan kota besar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk pengembangan tata kelola di Desa Rante Mario tetapi juga dapat menjadi model untuk implementasi e-government di desa-desa lain di Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih bulan setelah seminar proposal. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekriptif. merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang di gunakan adalah secara deskriptif yaitu mengumpulkan, Menyusun dan menjelaskan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Implementasi E-Government di Desa Rante Mario

Desa Rante Mario, yang terletak di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, merupakan salah satu desa yang menjadi fokus dalam pengembangan smart village. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan sistem e-government guna meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di tingkat desa. Implementasi e-government di desa ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah berbasis elektronik, yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks ini, kesiapan infrastruktur dan sumber daya menjadi faktor kunci yang harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan keberhasilan program smart village di Desa Rante Mario.

Pada awal implementasi program smart village, Desa Rante Mario menghadapi tantangan besar terkait dengan akses internet. Sebelumnya, desa ini tidak memiliki akses internet yang memadai, yang menghambat berbagai upaya untuk mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, melalui berbagai upaya pemerintah dan kerjasama dengan penyedia layanan internet, desa ini kini telah memiliki akses internet yang cepat dan andal. Penyediaan akses internet yang memadai adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun infrastruktur digital yang diperlukan untuk implementasi e-government (Elbahnasawy, 2014; Furuholt & Sæbø, 2018; Nimer et al., 2022). Konektivitas internet yang baik memungkinkan perangkat desa dan masyarakat untuk terhubung dengan sistem e-government secara efisien. Ini mencakup akses ke portal layanan publik dan sistem informasi desa.

Kesiapan sumber daya manusia adalah aspek penting dalam implementasi e-government (Ariana et al., 2020; Kumajas, 2021; Meiyanti et al., 2018; Sabani et al., 2019; Wairiuko et al., 2018). Literasi digital masyarakat Desa Rante Mario menjadi salah satu fokus utama dalam program smart village.

Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital dasar seperti komputer dan smartphone merupakan indikator literasi digital yang cukup memadai. Masyarakat desa telah mulai terbiasa dengan penggunaan perangkat digital untuk berbagai keperluan, seperti komunikasi, informasi, dan transaksi.

Program pelatihan literasi digital telah dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, akses internet, serta penggunaan aplikasi layanan publik online. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program e-government dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain masyarakat, aparatur desa juga perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital dan sistem e-government. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur desa telah dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem e-government. Ini mencakup pelatihan dalam penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi layanan publik, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip tata kelola e-government. Pelatihan ini juga mencakup aspek keamanan informasi, manajemen data, dan etika dalam penggunaan teknologi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aparatur desa dapat mengelola sistem e-government dengan efisien dan aman, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam E-Government untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Sosialisasi dan edukasi publik menjadi langkah awal yang diambil oleh pemerintah desa Rante Mario. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya e-government. Melalui kegiatan sosialisasi, warga diperkenalkan dengan berbagai layanan digital yang tersedia, serta manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Edukasi publik juga mencakup pelatihan penggunaan perangkat digital dan aplikasi e-government. Ini membantu masyarakat untuk lebih percaya diri dan kompeten dalam memanfaatkan teknologi yang disediakan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat ditekankan. Pemerintah desa melibatkan warga dalam musyawarah desa, memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan terkait program-program yang akan dijalankan. Partisipasi ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap program smart village, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dapat terwujud dengan lebih baik.

Implementasi e-government di Desa Rante Mario telah menunjukkan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Beberapa layanan pemerintah desa, seperti surat menyurat dan pelayanan administrasi, sudah dilakukan secara elektronik dan berbasis online. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan akurasi dan ketertiban administrasi. Warga merasa lebih terlayani dengan sistem yang lebih efisien dan transparan. Pentingnya kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program smart village. Pemerintah desa perlu memahami kebutuhan dan harapan masyarakat untuk memastikan program yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rante Mario, program smart village di desa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Kepala Desa menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyentuh berbagai aspek kehidupan,

termasuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Pihak desa juga sangat terbuka terhadap saran dari berbagai kalangan masyarakat, serta memperhatikan kepuasan layanan yang diberikan. Sekretaris Desa menambahkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kader desa dan pemerintah kabupaten, sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Meskipun masih ada tantangan, seperti kurangnya sumber daya dan keahlian teknis, pemerintah desa berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui kolaborasi dan pelatihan.

Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan juga menjadi salah satu fokus utama dalam program smart village. Melalui optimalisasi e-government, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha lokal dan menciptakan peluang kerja baru. Pelatihan teknologi bagi masyarakat merupakan bagian penting dari strategi pengembangan e-government. Melalui pelatihan ini, masyarakat diajarkan cara menggunakan perangkat digital dan aplikasi e-government untuk mengakses layanan publik. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal juga ditekankan untuk mendukung keberlanjutan program smart village. Pemanfaatan ini tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam e-government di Desa Rante Mario berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai pendekatan yang melibatkan sosialisasi, edukasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengembangan sistem informasi terbuka, pelatihan dan pengembangan kapasitas, kolaborasi dengan sektor swasta, dan evaluasi berkala. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah desa berupaya menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga desa melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam Implementasi smart village di Desa Rante Mario sudah memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari program smart village ini adalah untuk menyentuh seluruh lapisan Masyarakat dengan fokus pada mencegah ketertinggalan dalam sektor Pendidikan dan ekonomi. Evaluasi keberhasilan program diukur melalui keterbukaan pemerintah desa terhadap implementasi dari berbagai pihak serta Tingkat kepuasan layanan Masyarakat. Respon positif juga dari masyarakat terhadap smart village terhadap akses informasi dan layanan publik menunjukkan dampak positif program ini terhadap kemajuan desa. Meskipun terdapat beberapa keprihatinan dan saran, tetapi respon positif itulah yang menandakan bahwa program ini mampu mendukung kemajuan Desa Rante Mario. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana Namun kesesuaian ini tercermin dalam penyediaan infrastruktur teknologi oleh beberapa organisasi, yang dapat meningkatkan efisiensi program. Meskipun demikian, tantangan terkait sumber daya dan keahlian teknis masih merupakan rintangan yang perlu diatasi. Kelompok kader smart village memiliki tujuan yang jelas, seperti peningkatan literasi teknologi, pelatihan keterampilan, implementasi Solusi teknologi, dan pengembangan usaha lokal. Dan di lakukan juga evaluasi target Desa Cerdas yang bersifat fluktuatif tanpa penetapan target.

Ucapan Terimakasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengajar dan mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu saya dalam pembuatan naskah jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Achmad, M., Patu, M., & Ashariana, A. (2021). The effect of E-government implementation on the quality of electronic identity card public service in Indonesia. *Croatian and Comparative Public Administration*, 21(2), 259–281. <https://doi.org/10.31297/HKJU.21.2.3>
- Adamowicz, M., & Zwolińska-Ligaj, M. (2020). The “Smart Village” as a way to achieve sustainable development in rural areas of Poland. *Sustainability*, 12(16), 6503.
- Adesipo, A., Fadeyi, O., Kuca, K., Krejcar, O., Maresova, P., Selamat, A., & Adenola, M. (2020). Smart and climate-smart agricultural trends as core aspects of smart village functions. *Sensors*, 20(21), 5977.
- Afrizal, D., & Wallang, M. (2021). Attitude on intention to use e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 22(1), 435–441. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp435-441>
- Aichholzer, G., & Strauß, S. (2016). Electronic participation in Europe. *Electronic Democracy in Europe: Prospects and Challenges of E-Publics, E-Participation and E-Voting*, 55–132. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27419-5_3
- Alcaide Muñoz, L., & Rodríguez Bolívar, M. P. (2017). Experiences of e-government development implementation in developing countries: Challenges and solutions. *International E-Government Development: Policy, Implementation and Best Practice*, 3–18. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63284-1_1
- Alsaif, M. (2013). Factors affecting citizens’ adoption of e-Government moderated by socio-cultural values in Saudi Arabia. In *Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG* (pp. 578–586). University of Birmingham.
- Anando Archie Alexander Pangemanan, S. D. S. K. Y. D. Y. R. (2021). Digital Village Development Planning In Kauditan I. *Jurnal Teknik Informatika*, 16(4), 393–400.
- Ariana, S., Azim, C., & Antoni, D. (2020). Clustering of ICT human resources capacity in the implementation of E-government in expansion area: a case study from pali regency. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1754103.
- Asmorowati, S., Setijaningrum, E., Suaedi, F., & Fatmawati Dewi, Y. (2019). Smart Governance in Public Financial Management: A Study of Government Resources Management System (GRMS) in the City of Surabaya. *Iapa Proceedings Conference*, 481. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.249>
- Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The smart village model for rural area (case study: Banyuwangi Regency). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 722(1), 12011.
- Azilani, N., Adibrata, Y., & Clement, Y. (2020). Strategi Pemasaran dalam Pengembangan UMKM Berbasis Kerajinan untuk Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Ipb*, 1, 1–7.
- Bataineh, L., & Abu-Shanab, E. (2016). How perceptions of E-participation levels

- influence the intention to use E-government websites. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 10(2), 315–334. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2015-0058>
- Bielska, A., Stańczuk-Gałwiaczek, M., Sobolewska-Mikulska, K., & Mroczkowski, R. (2021). Implementation of the smart village concept based on selected spatial patterns–A case study of Mazowieckie Voivodeship in Poland. *Land Use Policy*, 104, 105366.
- Bondarchuk P. (2021). Political Sciences Digitalization in the Values System of Public Administration: National Security Aspect. *Sciences of Europe* #, 66(66–3), 69–71. <http://visnik.knteu.kiev.ua/index.php?op->
- Bwalya, K. J., & Mutula, S. (2016). A conceptual framework for e-government development in resource-constrained countries: The case of Zambia. *Information Development*, 32(4), 1183–1198. <https://doi.org/10.1177/0266666915593786>
- Cedric Bizimana, S. (2020). E-government Readiness Assessment for Government institutions in Burundi. *International Journal of European Studies*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ijes.20200401.11>
- Chan, C. M. L. (2013). From open data to open innovation strategies: Creating e-services using open government data. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 1890–1899. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2013.236>
- Chohan, S. R., & Hu, G. (2022). Strengthening digital inclusion through e-government: cohesive ICT training programs to intensify digital competency. *Information Technology for Development*, 28(1), 16–38. <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1841713>
- Dias, G. P. (2020). Global e-government development: besides the relative wealth of countries, do policies matter? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(3), 381–400. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2019-0125>
- Effah, J., & Nuhu, H. (2017). Institutional barriers to digitalization of government budgeting in developing countries: A case study of Ghana. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 82(1), 1–17.
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-government, internet adoption, and corruption: an empirical investigation. *World Development*, 57, 114–126.
- Epps, F., Wiley, Z., Teunis, L. J., Johnson, T. M., Patzer, R. E., Ofotokun, I., & Franks, N. (2021). A Framework for Mobilizing Health Care to Respond to the Community Within the COVID-19 Pandemic. In *Preventing Chronic Disease* (Vol. 18, pp. 1–7). [ncbi.nlm.nih.gov. https://doi.org/10.5888/pcd18.200572](https://doi.org/10.5888/pcd18.200572)
- Farida, I., & Lestari, A. (2021). Implementation of E-Government as a Public Service Innovation in Indonesia. *RUDN Journal of Public Administration*, 8(1), 72–79. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2021-8-1-72-79>

- Fatimah, S., Judawinata, M. G., Barkah, M. N., Trimo, L., & Deliana, Y. (2020). Towards smart village: A case study of genteng village development in Sumedang, West Java, Indonesia. *Society*, 8(2), 663–676.
- Ferdiansyah, V., & Hidayat, D. (2014). E-Government: Study Fenomenologi Rwnet Sebagai Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Fungsi E-Government Di Pemerintah Kota Bandung. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, 1(1), 1–13.
- Florano, E. R. (2014). Community Governance for Disaster Recovery and Resilience: Four Case Studies in the Philippines (Issue October). econstor.eu.
<http://dirp3.pids.gov.ph/webportal/CDN/PUBLICATIONS/pidsdps1438.pdf%5Cnhttp://serp-p.pids.gov.ph/serp-p/details.php?pid=5430¶m=Florano%2C+Ebinezer+R>.
- Furuholt, B., & Sæbø, Ø. (2018). The role telecentres play in providing e-government services in rural areas: A longitudinal study of Internet access and e-government services in Tanzania. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(1), e12006.
- Gamayuni, R. R. (2020). Implementation of e-planning, e-budgeting and government internal control systems for financial reporting quality at local governments in Indonesia. *Talent Development and Excellence*, 12(1), 112–124.
- Gamayuni, R. R., & Agusta, E. (2019). E-Planning and E-Budgeting Implementation: A Qualitative Study in Lampung Province. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 2(2), 105–122.
<https://doi.org/10.23960/ijebe.v2i2.54>
- Gamayuni, R. R., & Hendrawaty, E. (2022). E-Planning, E-Budgeting and the Quality of Government Institution Performance Accountability System in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 11(1s), 218–225.
<http://www.iratde.com>
- Gerli, P., Navio Marco, J., & Whalley, J. (2022). What makes a smart village smart? A review of the literature. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 16(3), 292–304.
- Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Giudice, M. Del, Dimitriou, S., & Michael, P. (2020). E-Government implementation challenges in small countries: The project manager’s perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 152, 119880. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119880>
- Halachmi, A., & Greiling, D. (2013). Transparency, E-government, and accountability: Some issues and considerations. *Public Performance and Management Review*, 36(4), 562–584. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360404>
- Harianja, N. (2018). the E-System Implementation for the Accountability of Padang Sidempuan Municipality, North Sumatra. *Asian Journal of*

- Management Sciences & ..., 7(2), 20-26. [http://www.ajmse.leena-luna.co.jp/AJMSEPDFs/Vol.7\(2\)/AJMSE2018\(7.2-03\).pdf](http://www.ajmse.leena-luna.co.jp/AJMSEPDFs/Vol.7(2)/AJMSE2018(7.2-03).pdf)
- Hartanto, D., Agussani, A., & Dalle, J. (2021). Antecedents of public trust in government during the COVID-19 pandemic in Indonesia: Mediation of perceived religious values. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(4), 321-341. <https://doi.org/10.29333/EJECS/975>
- Höchtel, J., Parycek, P., & Schöllhammer, R. (2016). Big data in the policy cycle: Policy decision making in the digital era. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 26(1-2), 147-169. <https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1125187>
- Hujran, O., Alarabiat, A., Al-Adwan, A. S., & Al-Debei, M. (2023). Digitally Transforming Electronic Governments into Smart Governments: SMARTGOV, an Extended Maturity Model. *Information Development*, 39(4), 811-834. <https://doi.org/10.1177/02666669211054188>
- Irsyadillah, R. R., & Ma'ruf, M. F. (2022). Kerjasama Pemerintah Desa Kemiri Dengan Polresta Sidoarjo Dalam Mewujudkan Kampung Tertib Lalu Lintas. *Publika*, 101-110. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p101-110>
- Jauhari, A., Basri, H., & Shabri, M. (2015). Penerapan Good Governanceberbasis E-government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi* <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4479>
- Joshi, P. R., & Islam, S. (2018). E-government maturity model for sustainable E-government services from the perspective of developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6), 1882. <https://doi.org/10.3390/su10061882>
- Kalinowski, S., Komorowski, Ł., & Rosa, A. (2022). The Smart Village Concept: Examples from Poland. *Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN*.
- Kolopaking, L. M., Wahyono, E., Irmayani, N. R., Habibullah, H., & Erwinsyah, R. G. (2022). Re-Adaptation of COVID-19 Impact for Sustainable Improvement of Indonesian Villages' Social Resilience in the Digital Era. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(7).
- Koniyo, M. H., Giriantari, I. A. D., Sudarma, M., & Wirastuti, N. M. A. E. D. (2021). Domain Concept of E-Government Evaluation Framework in Indonesian Local Government. *ICSGTEIS 2021 - 2021 International Conference on Smart-Green Technology in Electrical and Information Systems: Advancing Smart and Green Technologies Toward Society 5.0, Proceedings*, 58-62. <https://doi.org/10.1109/ICSGTEIS53426.2021.9650379>
- Koo, E. (2019). *Digital Transformation of Government: From E-Government to Intelligent E-Government* (pp. 1-92). Massachusetts Institute of Technology.
- Kumajas, Y. N. (2021). The Effects of Human Resources Quality, Infrastructure, Leadership, and Communication on E-Government Implementation: A Case of Indonesia Local Government. *Budapest International Research*

- and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 597–612.
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & ... (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu. *AS-SIYASAH: Jurnal* <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/5160>
- Kyakulumbye, S., Pather, S., & Jantjies, M. (2019). Towards design of citizen centric e-government projects in developing country context: The design-reality gap in Uganda. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 7(4), 55–73. <https://doi.org/10.12821/ijispm070403>
- Lee-Geiller, S., & Lee, T. (David). (2019). Using government websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation. *Government Information Quarterly*, 36(2), 208–225. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.003>
- Leong, C., Pan, S. L., Newell, S., & Cui, L. (2016). The emergence of self-organizing e-commerce ecosystems in remote villages of China: A tale of digital empowerment for rural development. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 40(2), 475–484. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2016/40.2.11>
- Low, C. C. (2021). Digitalization of migration management in Malaysia: Privatization and the role of immigration service providers. *Journal of International Migration and Integration*. <https://doi.org/10.1007/s12134-021-00809-1>
- Majeed, M. T., & Ayub, T. (2018). Information and Communication Technology (ICT) and economic growth nexus: A comparative global analysis. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 12(2), 443–476.
- Manenji, T., & Marufu, B. (2016). The impact of adopting e-government as a mechanism to enhance accountability as well as transparent conduct within public institutions. *Scholedge International Journal of Business Policy & Governance* ISSN 2394-3351, 3(7), 84. <https://doi.org/10.19085/journal.sijbpg030701>
- Marinică, C. E. (2020). Digitalization-The Key for Adapting Good Administration to a Better Governance. *Academic Journal of Law and Governance*, 8.2, 111–123.
- Maulita, N. (2022). Abdi dosen. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 352–356.
- Meiyanti, R., Utomo, B., Sensuse, D. I., & Wahyuni, R. (2018). e-Government challenges in developing Countries: A literature review. 2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM), 1–6.
- Milakovich, M. E. (2012). *Digital governance: New technologies for improving public service and participation* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203815991>

- Mohanty, S., Mohanta, B., Nanda, P., Sen, S., & Patnaik, S. (2020). Smart village initiatives: an overview. *Smart Village Technology: Concepts and Developments*, 3–24.
- Mynenko, S. V., & Liulov, O. V. (2022). The impact of digitalization on the transparency of public authorities.
- Napitupulu, D. (2017). A conceptual model of e-government adoption in Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 7(4), 1471–1478.
- Nas, J., Nurlinah, & Haryanto. (2019). Indigenous village governance: Lessons from Indonesia. *Public Administration Issues*, 2019(6), 94–104. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2019-0-6-94-104>
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementation of E-Budgeting as an Effort of the Enhancement of Transparency and Accountability in the Government of Binjai City in North Sumatra. 3rd International Conference on Accounting <https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.42>
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1916903>
- Negumbo, S. I. (2018). E-Government for Good Governance: Barriers to the Implementation of Digital Workflows in the Namibian Public Service (Issue March, p. 129). Stellenbosch: Stellenbosch University. <https://scholar.sun.ac.za:443/handle/10019.1/103753>
- Nimer, K., Uyar, A., Kuzey, C., & Schneider, F. (2022). E-government, education quality, internet access in schools, and tax evasion. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2044587.
- Oktariyanda, T. A., & Rahaju, T. (2018). E-government strategy of Surabaya city government through e-rt/rw to improve the quality of public service. *Journal of Physics: Conference* <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012161>
- Ong, A. K., Prasetyo, Y., Roque, R. A. C., Garbo, J. G. I., Robas, K. P. E., Persada, S. F., & Nadlifatin, R. (2022). Determining the Factors Affecting a Career Shifter's Use of Software Testing Tools amidst the COVID-19 Crisis in the Philippines: TTF-TAM Approach. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/SU141711084>
- Park, C., & Cha, J. (2019). A trend on smart village and implementation of smart village platform. *International Journal of Advanced Smart Convergence*, 8(3), 177–183.
- Patnaik, S., Sen, S., & Mahmoud, M. S. (2020). Smart village technology. *Modeling and Optimization in Science and Technologies*, 17, 181–189.
- Ponti, B., Cerrillo-i-Martínez, A., & Mascio, F. Di. (2021). Transparency, Digitalization and corruption. In *Understanding and Fighting Corruption in Europe: From Repression to Prevention* (pp. 97–126). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82495-2_6

- Purón-Cid, G. (2014). Measuring e-government efficiency from the perspective of implementers: The case of e-budgeting in Mexico. *Public Administration and Information Technology*, 5, 111–134. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9982-4_7
- Puspitarini, R. (2023). Application of E-Government to Financial Accountability in the Surabaya City. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 503–513. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i3.6844>
- Rachmawati, T., & Fitriyanti, K. D. (2021). Analysis of the E-government initiative at local government level in Bandung City, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 62–80. <https://doi.org/10.22146/JSP.58966>
- Rafinzar, R., & Kismartini, K. (2020). Inovasi e-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Faktor Pendukung dan Penghambat Program e-Musrenbang di Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 227–250.
- Raudah, R., Hidir, A., Nor, M., & Erliani, S. (2021). Understanding Educational Management in The Context of Environmental Protection for Madrasah Application. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 419–433. <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i2.1586>
- Renukappa, S., Suresh, S., Abdalla, W., Shetty, N., Yabbati, N., & Hiremath, R. (2022). Evaluation of smart village strategies and challenges. *Smart and Sustainable Built Environment*.
- Rido, A. (2020). Urgency Of Content Village Regulation In The Framework Of Village Governance. In *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* (Vol. 1, Issue 2, p. 123). Universitas Muhammadiyah Tangerang. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.2970>
- Rorissa, A., & Demissie, D. (2010). An analysis of African e-Government service websites. *Government Information Quarterly*, 27(2), 161–169. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.003>
- Roy, J. (2006). E-government in Canada: Transformation for the digital age. In *E-Government in Canada: Transformation for the Digital Age*. University of Ottawa Press. <https://doi.org/10.1353/book4431>
- Sabani, A. (2020). Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(2), 236–255. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046>
- Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. (2019). Evaluating the development of E-government in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering and Information Management*, 254–258.
- Sakti, R. R. A. (2021). Measurement of Financial Performance Using the Concept of Value for Money in The Government of Bandung City. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 5(1), 113–122. <https://doi.org/10.36555/jasa.v5i1.1470>
- Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2012). Are government internet portals evolving towards more interaction, participation, and collaboration? Revisiting the rhetoric of e-government among municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(SUPPL. 1), S72–S81.

<https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.09.004>

Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance. *Jeam*, 11(1), 1-19.

Schuppan, T. (2009). E-Government in developing countries: Experiences from sub-Saharan Africa. *Government Information Quarterly*, 26(1), 118-127. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006>

Setyawan, S., Priyono, N., & Iswanaji, C. (2018). Development Model of E-Budgeting and E-Reporting System on the Management of Village Fund Finance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 92-99. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12000>

Setyawan, W., & Gamayuni, R. R. (2020). The Quality of Financial Reporting and Internal Control System before and after the Implementation of E-budgeting in Indonesia Local Government. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 14(3), 22-31. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v14i330194>

Suhardi, S., Sofia, A., & Andriyanto, A. (2015). Evaluating e-government and good governance correlation. *J. ICT Res. Appl*, 9(3), 236-262.

Sukarno, M., & Nurmandi, A. (2023). E-Government Development Index Impact on World Governance Indicator Index in Southeast Asian Countries. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(1), 97-114. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.106>

Suryana, P. A. E., Yani, A. A., & Abdullah, M. T. (2024). Technology, Transparency, and Accountability: The Case of Smart Auditing in Makassar. *Journal of Digital Sociohumanities*, 1(1), 53-62. <https://doi.org/10.25077/jds.1.1.53-62.2024>

Suyatna, R., Madya, W. A., Pengembangan, B., Daya, S., Daerah, M., & Banten, P. (2019). Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Januari*, 1, 22-26.

Todoruț, A. V., & Tselentis, V. (2018). Digital technologies and the modernization of public administration. *Quality - Access to Success*, 19(165), 73-78.

Wairiuko, J. W., Nyonje, R., & Omulo, E. (2018). Human resource capacity and adoption of e-government for improved service delivery in Kajiado County, Kenya. *International Journal of Business and Social Science*, 9(10), 94-110.

Wang, X., & Zhu, Q. (2022). Influencing factors of traditional village protection and development from the perspective of resilience theory. *Land*, 11(12), 2314.

Wen, J., Deng, P., Zhang, Q., & Chang, C. P. (2021). Is higher government efficiency bringing about higher innovation? *Technological and Economic Development of Economy*, 27(3), 626-655. <https://doi.org/10.3846/tede.2021.14269>

- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public* <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/79>
- Wilke, N. G., Howard, A. H., & Pop, D. (2020). Data-informed recommendations for services providers working with vulnerable children and families during the COVID-19 pandemic. *Child Abuse and Neglect*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104642>
- Wilson, G. A., Hu, Z., & Rahman, S. (2018). Community resilience in rural China: the case of Hu Village, Sichuan Province. *Journal of Rural Studies*, 60, 130–140.
- Woro, S. J., & Supriyanto, S. (2013a). Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1865>
- Woro, S. J., & Supriyanto, S. (2013b). Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(1), 36–43. <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1865>
- Yap, C. S., & Ahmad, R. (2020). Citizen Satisfaction with E-Government Services in Malaysia. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1–4). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_4105-1
- Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. *Sustainability*, 12(24), 10510.
- Zhao, L., He, F., & Zhao, C. (2020). A framework of resilience development for poor villages after the wenchuan earthquake based on the principle of “build back better.” *Sustainability*, 12(12), 4979.